

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Pekalongan berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di dataran rendah sepanjang Pantura atau Pantai Utara Laut Jawa. Kota Pekalongan dengan posisi yang strategis memiliki peran sebagai pusat pengembangan untuk wilayah sekitarnya yakni Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang serta menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, industri, pariwisata dan perikanan. Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Utara (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013).

Kota Pekalongan termasuk dalam daerah dataran rendah ketinggian 0-2 meter di atas permukaan laut dengan permukaan lahan relatif datar dan kemiringan lereng antara 0-8%. Hal ini menyebabkan Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat gelombang dan pengikisan tanah. Kondisi topografi yang cenderung datar menyebabkan Kota Pekalongan sering terjadi abrasi di garis pantai dan penurunan tanah. Kondisi rentannya terhadap genangan akibat ombak pasang, daerah pesisir pantai utara Kota Pekalongan juga rentan terhadap banjir rob.

Banjir rob merupakan banjir yang terjadi karena pasangannya air laut yang menyebabkan meluapnya air ke wilayah daratan dengan permukaan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Karakteristik dari banjir rob akan

menyebabkan tergenangnya daratan dan terjadinya penurunan muka tanah. Daerah yang dekat dengan lokasi pantai akan berpotensi besar terhadap fenomena turunnya permukaan tanah. Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Utara memiliki resiko penurunan muka tanah tertinggi dengan nilai 27,51 cm per tahun. Hal ini menyebabkan ancaman yang begitu serius terkhusus di wilayah pesisir pantura. (Iskandar et al., 2020)

Sepanjang tahun semenjak 2014, Kota Pekalongan selalu mendapatkan agenda tahunan yakni banjir rob. Kondisi banjir rob di Kota Pekalongan diakibatkan karena dua faktor, yakni faktor manusia dan alam. Fenomena pemanasan global akibat dari krisis iklim berdampak pada naiknya muka air laut. Akibat letak geografis Kota Pekalongan yang dekat dengan kawasan pesisir menyebabkan selalu adanya permasalahan gelombang air di setiap tahunnya. Sebagai salah satu makhluk yang berkaitan langsung dengan alam, manusia juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya bencana khususnya banjir rob di Kota Pekalongan. Banjir rob menjadi semakin parah karena aktivitas manusia yang berlebihan dan memanfaatkan alam sebagai pemenuhan kebutuhan secara maksimal.

Berdasarkan perhitungan dan riset Badan Informasi Geospasial, Kota Pekalongan merupakan wilayah paling signifikan di Pantai Utara Jawa yang mengalami penurunan daratan dalam 10 tahun akhir (8-20 cm/tahun). Penggunaan air tanah secara eksploitatif mendominasi sampai lebih dari 90% sebagai sumber daya bahan industri. Kurangnya kontrol tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan solusi penanganan banjir rob seperti pembangunan tanggul,

penanaman mangrove dan lain-lain terlaksana kurang maksimal. Pembuatan tanggul merupakan salah satu solusi sementara atau bahkan bisa disebut sebagai *painkiller* atau hanya sebagai penawar rasa sakit akibat parahnya kondisi rob. pembangunan tanggul juga memiliki dampak negatif karena jika tetap ada banjir memungkinkan tanggul tersebut ikut turun dengan tanah.

Pemanfaatan manajemen lahan pada wilayah pesisir yang tidak tepat dengan analisis dampak lingkungan yang kurang dan tidak transparan akan memperparah kondisi ketahanan banjir rob yang terjadi selama bertahun-tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan menyebutkan bahwa di tahun 2020 terdapat tujuh kelurahan di Kota Pekalongan yang terdampak banjir rob setinggi 75 cm. Kondisi banjir rob yang semakin parah dari tahun ke tahun memunculkan banyak kerugian bagi penduduk di sekitar wilayah pesisir Kota Pekalongan. Mayoritas penduduk yang berada di pesisir pantai utara Kota Pekalongan mengandalkan perekonomiannya dengan bekerja dari hasil perikanan laut Jawa menjadi terganggu dan terbatas akibat adanya fenomena banjir rob. Pekerjaan lain seperti petani yang mengurus lahan pertanian, pekerja batik, guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya mengeluhkan bencana langganan tiap tahun ini.

Pekerjaan dari sektor manapun mengakibatkan kualitas hidup seseorang yang terdampak banjir rob secara langsung menjadi terancam. Kondisi lingkungan fisik yang tidak pasti akan mempengaruhi kondisi sosial kuantitas dan kualitas penduduk. Banyaknya infrastruktur yang rusak akibat banjir rob menjadi faktor yang makin mempersulit warga Kota Pekalongan dalam bertahan hidup. Kondisi tanah

yang relatif lebih rendah atau dangkal dari wilayah lain menyebabkan kebutuhan pengambilan air tanah oleh masyarakat dilakukan secara berlebihan yang menimbulkan dampak buruk dalam jangka waktu tertentu yakni terjadinya penurunan tanah. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi peringatan bagi masyarakat ataupun pemerintah untuk menggunakan sumber daya air secukupnya serta tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap air khususnya air tanah.

Beban yang dirasakan oleh warga Kota Pekalongan tidak berhenti karena adanya kejadian bencana banjir rob saja, namun pada tahun 2020 pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan biasa disebut virus corona mulai memasuki wilayah Kota Pekalongan. Virus ini berasal dari Kota Wuhan, China yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah. Begitu juga dengan Kota Pekalongan yang terkena dampak dari penyebaran virus corona dari bulan April 2020 hingga saat ini. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana terbagi menjadi tiga jenis antara lain bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Pandemi COVID-19 termasuk dalam bencana non alam karena diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan pandemi penyakit. Hadirnya virus ini ke wilayah Pekalongan menyebabkan perlunya berbagai tindakan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan segala aktivitas yang menyebabkan kerumunan dihentikan sementara sampai keadaan memungkinkan.

Banjir rob di tahun 2020 merupakan banjir terparah yang dirasakan oleh warga pantura, ditambah kehadiran pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir

(Radar Semarang, 2020). Perjuangan warga Kota Pekalongan kini berlipat ganda, selain melawan pandemi virus corona mereka juga harus bersinergi untuk mengatasi bencana banjir rob yang selalu melanda sebagian dari kota ini. Dua bencana yang datang yakni bencana alam berupa banjir rob dan bencana non-alam berupa pandemi virus corona membutuhkan tanggapan serius dan keterlibatan pasti dari berbagai elemen seperti pemerintah kota, *civil society* dan masyarakat umum. Kedua bencana tersebut menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah setempat dan masyarakat. Permasalahan dan beban yang dihadapi oleh warga Kota Pekalongan tidak bisa diselesaikan hanya dengan program pemerintah kota saja, namun perlu sinergi dari masyarakat karena ini merupakan persoalan besar (Suara Merdeka Pantura, 2021).

Berada di Kawasan pesisir memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terjadinya banjir akibat pasang gelombang, naiknya air laut akibat turunnya permukaan tanah ataupun erosi pantai menjadi hal biasa dihadapi oleh masyarakat pesisir. Banjir rob yang terjadi pada tahun 2020 bebarengan dengan pandemi COVID-19 lebih mempersulit penanganan dan menyebabkan berbagai kompleksitas persoalan. Kota Pekalongan yang merupakan kota pesisir Pantai Utara Jawa atau biasa disingkat dengan Pantura pada masa pandemi COVID-19 ini memerlukan kemampuan adaptasi yang lebih. Adaptasi tersebut tidak hanya untuk jangka pendek dalam menangani banjir rob namun juga jangka panjang dengan menyesuaikan permasalahan lain yang mungkin akan hadir.

Kompleksitas yang dihadapi masyarakat yang terdampak banjir rob pada masa pandemi COVID-19 mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan yang

merugikan produktivitas masyarakat. Permasalahan fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh khususnya pada saat pandemi banyak aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat dan kondisi ini membuat lemah pertumbuhan ekonomi warga terdampak. Aktivitas perekonomian menjadi terbatas akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna pencegahan penularan pandemi COVID-19. Terjadinya multi bencana memerlukan perhatian dengan memaksimalkan proses manajemen bencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 tidak meluas saat evakuasi, saat bencana atau tanggap darurat sampai ke pemulihan (Hartono dkk, 2021).

Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, salah satu isu strategis yang diangkat yakni terkait penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan mendapat dukungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pembangunan dan peninggian tanggul raksasa di kawasan pesisir setiap tahunnya. Namun sesuai dengan laporan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, upaya yang telah dilakukan tersebut masih banyak kekurangan dan sampai saat ini luas genangan masih sebesar 38,28% dari luas wilayah Kota Pekalongan. Berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan, namun masih banyak kekurangan dan kendala khususnya dalam penataan drainase dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang berkaitan dengan pengendalian banjir rob. Isu strategis tersebut menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adanya prediksi tenggelamnya Pantura pada 2050 menjadi topik yang sering diperbincangkan saat ini. Faktor-faktor yang memperparah rob menjadi keributan seluruh elemen masyarakat menjadikan banyaknya kajian-kajian dan penelitian akademik penanggulangan banjir rob. Upaya penanganannya memerlukan banyak kontribusi tidak hanya dari satu sektor namun membutuhkan kolaborasi antar sektor pemerintah. *Civil society* sebagai salah satu elemen dari masyarakat sipil non pemerintah perlu turut berpartisipasi dalam kolaborasi penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Kehadiran gerakan-gerakan akar rumput secara kolektif merupakan kesempatan bagi Kota Pekalongan untuk bangkit lebih kuat dalam mengatasi bencana banjir rob pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat sebagai kesempatan kolaborasi secara komprehensif.

Relasi antar pemerintah daerah dan *civil society* kurang menjadi sorotan peneliti dalam kolaborasinya menangani banjir rob. Sementara itu, banyak *civil society* di Kota Pekalongan yang ikut bertanggung jawab dalam penanganan banjir rob. Komunitas-komunitas yang hadir dari adanya keresahan bersama lalu tergabung dalam perkumpulan Save Pekalongan memiliki keinginan untuk secara langsung terlibat membantu pemerintah guna membantu penanganan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melihat secara horizontal bentuk tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dalam menangani permasalahan banjir rob. Kehadiran *civil society* memiliki potensi atau kelebihan yang dapat membantu kolaborasi penanganan banjir rob di Kota Pekalongan menjadi lebih berdinamika.

Civil Society Organization di Kota Pekalongan memberikan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan seperti pengurangan resiko bencana, penanganan dampak perubahan iklim, serta melakukan aksi dan kampanye pelestarian lingkungan. Komunitas-komunitas di Kota Pekalongan berkumpul untuk memperkuat sinergi dalam penanganan rob dengan saling berbagi sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang diberikan berupa fisik ataupun non fisik berupa tenaga, program, gagasan, advokasi, bantuan peralatan penunjang sarana prasarana, dan lain sebagainya. Berbagai sumber daya yang terkumpul dapat menjadi potensi dalam merepresentasikan kekuatan masyarakat sipil dan pemerintah Kota Pekalongan dalam menghadapi permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan dan *civil society* Dalam Penanganan Banjir Rob Pada Masa Pandemi Covid-19”**. Hal tersebut dilakukan sebab menariknya pembahasan bencana banjir rob di Kota Pekalongan yang tak kunjung usai dan adanya tambahan bencana non alam pandemi COVID-19 semenjak tahun 2020 hingga saat ini merupakan hal baru dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada permasalahan banjir rob saja. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari jawaban terkait dinamika kolaborasi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama *civil society* di Kota Pekalongan dalam menangani banjir rob pada masa pandemi COVID-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana dinamika kolaborasi pemerintah Kota Pekalongan dan *civil society* dalam menangani banjir rob pada masa pandemi COVID-19?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung kolaborasi dalam menangani banjir rob Kota Pekalongan di masa pandemi COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dinamika kolaborasi pemerintah Kota Pekalongan dan *civil society* dalam menangani bencana banjir rob pada masa pandemi COVID-19.
2. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung kolaborasi dalam menangani banjir rob Kota Pekalongan di masa pandemi COVID-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dan masukan pada pengembangan studi Ilmu Pemerintahan, terkhusus sebagai pengetahuan dinamika kolaborasi pemerintah dan *civil society* dalam menangani banjir rob di Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah serta dapat menjadi bahan evaluasi terkait kolaborasi yang telah

dilakukan dalam menangani banjir rob di Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat serta bisa menjadi referensi dalam memberikan semangat gotong royong dan bekerja sama dalam menangani banjir rob di Kota Pekalongan khususnya pada masa pandemi COVID-19.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 10 penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal dan buku sesuai dengan pembahasan yang masih berkaitan dan relevan. Penelitian-penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan dalam mencari persamaan, perbedaan, dan melihat hasil penelitian dari berbagai macam studi kasus yang akan dibandingkan dengan penelitian ini. Sepuluh penelitian terdahulu tersebut terurai dalam tabel dibawah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tika Mutiarawati, Sudarmo (2017)	<i>Collaborative governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Bentuk <i>Collaborative governance</i> dalam menindak rob di Kelurahan Bandengan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan

			<p>Umum (DPU) Kota Pekalongan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Pekalongan Utara, Fasilitator Kelurahan Bandengan dan Badan Keswadayaan (BKM) Bandengan hanya bersifat semiformal dengan pengertian sudah ada komunikasi dan koordinasi namun belum adanya keepakatan secara tertulis atau yang terekap secara administratif dengan tipe <i>self governance</i> dan adanya ego sektor. Kolaborasi yang terjalin dengan berbagai stakeholders memiliki komitmen dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan yang profesional sesuai</p>
--	--	--	--

			dengan peran masing-masing. Beberapa hambatan yang terjadi dalam kolaborasi ini adalah adanya ego sektor akibat persepsi yang berbeda, terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan perannya, kesadaran masyarakat yang kurang dan persoalan keuangan yang terbatas. Peneliti menyimpulkan kolaborasi tersebut belum maksimal.
2.	Dwi Aprillia Hapsari (2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2018	Peran masyarakat yang terlibat dalam melakukan mitigasi bencana banjir rob di Kelurahan Kandangan Panjang pada tahun 2018 terdapat peningkatan. Keterlibatan masyarakat berupa kemauan menambah pengetahuan terkait mitigasi, keikutsertaan dalam agenda

			<p>rapat warga dengan memberikan ide, terlibat dalam pembangunan dan sikap gotong royong.</p>
3.	<p>Novi Jumatiningrum, Ariyanti Indrayanti (2019)</p>	<p>Strategi Adaptasi Masyarakat Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dalam Menghadapi Banjir Pasang Air Laut (Rob)</p>	<p>Respon masyarakat Bandengan terhadap banjir rob disebabkan oleh berbagai faktor yakni lingkungan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Mayoritas pekerjaan di Kelurahan Bandengan adalah nelayan dengan rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi yang terbatas menyebabkan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk berpindah ke tempat lain dan terpaksa terbiasa dengan kondisi banjir rob. Strategi masyarakat Bandengan dalam beradaptasi dengan banjir rob selama kurang</p>

			lebih 10 tahun yakni dengan meninggikan bagian depan rumah agar air laut (rob) tidak masuk ke area rumah.
4.	Ratna Mustika A., Indah Susilowati, Fuad Muhammad (2020)	Analisis Efektifitas Tanggul Laut di Pesisir Pekalongan Terhadap Penurunan Intensitas Banjir	Daerah dengan tingkat bahaya banjir rob “rendah hingga “sangat tinggi” tersebar di tujuh kelurahan di Kota Pekalongan antara lain Kelurahan Bandengan, Degayu, Tirto dan Pasir Kraton Kramat, Desa Pecakaran, Tegaldowo dan Jeruksari. Pembuatan tanggul yang ditujukan sebagai penahan banjir dan rob di tingkat bahaya “sangat tinggi” banjir rob tersebut disimpulkan tidak terlalu berdampak secara signifikan. Peneliti menemukan bahwa tiap-tiap desa dengan kondisi level bahaya tertentu belum

			<p>memiliki cara dalam mengatasi permasalahan banjir dan rob seperti mitigasi, sistem peringatan dini dan rehabilitasi. Pembentukan program kebencanaan, perbaikan saluran drainase, optimalisasi utilisasi pompa serta peningkatan kearifan lokal dengan semangat gotong royong membersihkan desa merupakan startegi yang bisa ditawarkan oleh peneliti.</p>
5.	<p>Syafrei Adi Iskandar, Muhammad Helmi, Muslim, Sugeng Widada, Baskoro Rochaddi (2020)</p>	<p>Analisis Geospasial Area Genangan Banjir Rob dan Dampaknya pada Penggunaan Lahan Tahun 2020-2025 di Kota Pekalongan</p>	<p>Berdasarkan Peta Penurunan Muka Tanah Kota Pekalongan Tahun 2017-2019 yang diolah menggunakan metode DInSAR menampilkan bahwa adanya penurunan muka tanah di Kota Pekalongan dengan nilai</p>

		Provinsi Jawa Tengah	<p>tertinggi yakni berada di Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 27,51 cm per tahun. Hal tersebut dikarenakan terjadinya konsolidasi atau pemampatan lapisan tanah. Faktor bulan purnama mengakibatkan kondisi air laut menyebabkan pasang menjadi lebih tinggi. Hasil analisis geospasial di area genangan banjir rob Kota Pekalongan menunjukkan bahwa adanya perubahan luas 477,57 Hektar di tahun 2020 menjadi 1877,07 Hektar di tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan naiknya muka air laut dan <i>land subsidence</i>.</p>
6.	Hendri Hermawan Adinugraha, Syarif Hidayatullah, Farisa	Pendampingan Pertolongan Pertama Bagi	Terjadinya bencana banjir rob di Kota Pekalongan pada masa Pandemi COVID-19

	Novita Sari, Mohamad Bahtiar, Armilatun Nasofa, Dina Nur Amillah Balbisi, Rahmawati Yunia Astuti (2021)	Masyarakat Korban Banjir di Kota Pekalongan	memerlukan pendampingan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terdampak. Terdapat beberapa tahapan yang perlu untuk dilakukan antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan dengan penanganan medis dasar. Penanganan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terdampak banjir rob memerlukan sarana tambahan yakni kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker, kacamata pelindung, sarung tangan lateks, baju pelindung dan helm.
7.	Rizka Febri Ramadhanni (2015)	Implementasi Program Penanganan Banjir Rob di Wilayah	Implementasi program penanganan banjir rob dilihat dari komunikasi, ketersediaan sumber daya,

		Pesisir Kota Pekalongan	sikap dan komitmen dari penyelenggara program dan struktur birokrasi. Kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yakni 1) adanya perbatasan wilayah, 2) masyarakat yang kurang perhatian dengan program pemerintah, 3) pompa air terbatas 4) terbatasnya anggaran. Beberapa upaya yang bisa disarankan yakni 1) melakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintah batas wilayahnya, 2) memeberdayakan masyarakat yang terdampak, 3) mengoptimalkan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan banjir, 4) meningkatkan anggaran
--	--	----------------------------	---

			dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.
8.	Mukhamad Afif Salim, Agus Bambang Siswanto (2018)	Penanganan Banjir dan Rob di Wilayah Pekalongan	Pemerintah Kota Pekalongan memiliki konsep untuk menanggulangi banjir rob seperti pengadaan tampungan air sementara dan pompa air serta pembatasan aliran dan pembesaran lebar sungai. Pembuatan tanggul, longstorage, kolektor drain untuk mencegah peluapan air semakin luas. Konsep tersebut dapat berjalan dengan baik apabila adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah secara bertanggung jawab serta perlunya memelihara dan memanfaatkan secara baik infrastruktur yang telah dibangun.

9.	Mukhammad Najmul Ula (2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rob di Kabupaten Pekalongan	Beberapa kebijakan yang mendasari penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan yakni RPJMD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 yang tertera pada Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017. Kebijakan menurut Hogwood dan Gunn merupakan model yang digunakan peneliti dalam menganalisis implementasi program yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
10.	Anang Sugeng Cahyono (2020)	Implementasi Model <i>Collaborative governance</i> dalam Penyelesaian Pandemi COVID- 19	Pemerintahan kolaboratif merupakan salah satu langkah yang di ambil pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, namun dalam permasalahan

			<p>penanggulangan pandemic COVID-19, langkah dan hasil yang didapat belum optimal. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah perlunya pengoptimalan dalam mengefektifkan peran kolaborasi antar pemerintah, pengumpulan fakta secara klinis dan praktis, pembentukan satuan petugas atau tim gabungan, layanan kesehatan yang terjamin secara menyeluruh, kepatuhan terhadap aturan pembatasan sosial serta strategi upaya mitigasi seperti masyarakat yang mendapatkan pelayanan public dengan baik.</p>
--	--	--	--

Dari penelitian-penelitian yang tertera diatas dapat dilihat bahwa belum ada kajian yang fokus membahas banjir rob di Kota Pekalongan pada masa pandemi

COVID-19. Hanya sedikit penelitian yang membahas terkait *collaborative governance* dalam hal penanganan banjir rob di Kota Pekalongan dan belum ada yang meneliti kasus rob yang bersamaan dengan situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirasa menarik karena adanya permasalahan dari dua bencana yang datang bersamaan di tahun tersebut. Penanganan banjir rob dari tahun ke tahun oleh pemerintah Kota Pekalongan belum menemukan upaya yang signifikan dan masih membutuhkan bantuan dari kelompok masyarakat juga pihak swasta, ditambah dengan kehadiran pandemi COVID-19, pemerintah membutuhkan usaha lebih seperti kolaborasi secara massif bersama masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 4 terkait Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, Bab IV Pasal 10 terkait Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pasal 66 terkait Penanggulangan Bencana Non Alam.

Penelitian terdahulu tetap sebagai dasar peneliti dalam mempertimbangkan posisi penelitian ini khususnya terkait bencana banjir rob pada masa pandemi COVID-19. Kajian mengenai *collaborative governance* akan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keterlibatan *civil society* dalam menangani banjir rob di Kota Pekalongan khususnya pada saat pandemi COVID-19 yang akan menambah kajian penelitian mendatang.

1.6. Kajian Teori

Terdapat tiga teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain teori *collaborative governance*, *civil society*, dan manajemen bencana. Ketiga teori

tersebut digunakan sebagai landasan pendekatan ataupun bahan acuan dalam menjawab permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

1.6.1. Collaborative Governance

a. Pengertian *Collaborative governance*

Kata *collaborative* berasal dari bahasa Inggris yang dapat dijelaskan dalam tiga arti yakni adanya kerja sama bersama orang lain dalam urusan pekerjaan, adanya hasil dari kerja sama dengan orang lain dan bentuk kerja sama dengan orang lain (Dictionary.com). Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, menurut KBBI kata kolaborasi hanya fokus pada adanya kerja sama. *Collaborative* merupakan serangkaian kerja sama dalam menjawab isu-isu yang sedang berkembang dengan analisis dari berbagai aktor kebijakan yang terlibat atas dasar penyesuaian lingkungan yang terdampak. Kata *Governance* memiliki arti tata pemerintahan yang merupakan keseluruhan dari proses, metode, teknik manajemen dan lembaga-lembaga dengan berbagai rangkaian proses interaksi dan keputusan sosial-politik antara kelompok masyarakat dengan pemerintahan.

Collaborative governance merupakan komposisi pengaturan dari satu atau lebih instansi publik bersama pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah terlibat dengan cara pengumpulan keputusan secara bersama-sama atau kolektif yang memiliki sifat formal, bijaksana dan berorientasi pada kesepakatan. (Ansell dan Gash 2007:2) Menurut Tika dan Sudarmo (2017:85) *Collaborative governance* merupakan pengaruh beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan tergabung menjadi satu dalam misi yang sama. Menurut Nur Cahya (2020:8) menjelaskan kolaborasi pemerintah dapat diartikan

sebagai suatu cara tatanan pemerintahan dengan berbagai pihak yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat atas pandangan yang setara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

b. Konsep dan Prinsip *Collaborative governance*

Konsep dalam *collaborative governance* berkaitan dengan kerja sama dari beberapa instansi atau lembaga publik dengan masyarakat yang terlibat merencanakan, menentukan dan menjalankan misi sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Prinsip dari *collaborative governance* yakni tiap-tiap komponen yang terlibat memahami akan masalah dan kebutuhannya bersama serta disepakati bersama langkah-langkah yang akan dilakukan. Hal serupa tertera dalam Quintin (2012) bahwa *collaborative governance* termasuk adanya interaksi formal dan informal dalam identifikasi permasalahan sampai adanya keputusan. Proses kerja sama yang dilakukan dalam pemerintahan yang kolaboratif memerlukan penyediaan fasilitas bagi sektor publik mapupun privat beserta masyarakat.

Steven Greenwood dalam *Collaborative governance: Principles, Processes, and Practical Tools* menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang diutamakan dalam *collaborative governance*, yakni kepemimpinan, forum, dan dukungan. Kepemimpinan dalam hal ini menyatukan sektor yang terlibat dalam forum dan perlunya dukungan dalam identifikasi masalah di tiap kebijakan yang akan dibuat. Adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan bersama-sama memutuskan suatu kebijakan dan dalam pengimplementasiannya diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan masalah yang kompleks dapat terfasilitasi dalam

satu misi (Sudarmo, 2016). Menurut Ansell dan Gash (2007:6) terdapat enam kriteria dalam *collaborative governance*, antara lain :

- 1) Adanya forum yang digagas instansi atau lembaga public,
- 2) Anggota yang terlibat dalam forum tersebut merupakan aktor swasta,
- 3) Anggota dalam forum memiliki hak dalam menentukan keputusan,
- 4) Forum memiliki tujuan sebagai pencarian keputusan sesuai kesepakatan bersama,
- 5) Kolaborasi dilakukan secara terorganisir,
- 6) Orientasi kolaborasi menghasilkan kebijakan dan manajemen publik.

c. Tujuan Penerapan *Collaborative governance*

Ansell dan Gash (2007:544) menyatakan bahwa alasan penting diterapkannya *collaborative governance* karena sebagai bentuk respon dari gagalnya implementasi kebijakan yang telah dilakukan, faktor politik dalam penetapan regulasi serta banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan. *Collaborative governance* dibuat karena terdapat beberapa alasan-alasan penting seperti rumitnya permasalahan mengakibatkan perlunya bantuan instansi lain, konflik antar aktor kepentingan yang sulit diredam, sebagai bentuk usaha mencari metode tepat guna mencapai legitimasi politik, gagalnya penerapan kebijakan, kelompok-kelompok yang menghambat keputusan, pengerahan kelompok kepentingan yang lebih terorganisir dan banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan. Kemudian dalam Yulyana Dewi (2019, 205) mengungkapkan bahwa adanya keterlibatan dan keterikatan antar pihak-pihak yang berkepentingan terdapat tujuan untuk mencapai konsensus yang menguntungkan dengan manfaat bisa menghasilkan pelayanan

maupun barang. Menurut Nur Cahya (2020, 12) dengan dilaksanakannya kolaborasi dianggap sebagai solusi dari gagalnya implementasi program yang hanya dilakukan oleh satu lembaga dan banyaknya pihak yang terlibat dapat mengurangi tingginya biaya penanganan.

d. Model dan Proses *Collaborative governance*

Model tahapan *collaborative governance* dalam Ansell dan Gash (2007:8) antara lain :

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Tahapan ini para pemangku kepentingan menjalin relasi dengan latar belakang yang berbeda namun memiliki visi dan misi bersama, menjalin kerja sama, kepercayaan dan kekuatan yang terbangun dalam suatu hubungan kolaborasi.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan dalam hal ini menjadi faktor penting dalam terselenggaranya hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan fasilitas diperlukan guna mengukur keefektifitasan manajemen dari kerja sama antar pihak yang terlibat dapat berlangsung kelancaran kinerja, adanya musyawarah yang menghasilkan peraturan yang jelas, penyediaan forum-forum kesepakatan dan keputusan yang kredibel serta meyakinkan seluruh pihak.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain institusional mengarah pada adanya aturan-aturan dasar atau tata cara terkait prosedural proses kolaborasi yang telah disepakati terdapat keterbukaan secara menyeluruh atau inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi merupakan tahapan perkembangan dari adanya pengelolaan urusan publik. Secara singkat proses dapat dilihat dari awal penentuan permasalahan, tujuan dan pengimplementasian. Tahapan dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:15) dapat diuraikan sebagai berikut

1. Dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*)
2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
3. Komitmen terhadap proses (*Commitment to Process*)
4. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)
5. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

1.6.2. Civil Society

Definisi *civil society* oleh Hegel dalam bukunya *Philosophy of Right*, 1821 berpendapat bahwa *civil society* merupakan suatu ruang kehidupan secara etis yang terjalin antara keluarga dan negara. Perkembangan dalam 100 tahun kemudian, Larry Diamond (1994) memperjelas bahwa *civil society* merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisir bersifat ikhlas, mandiri, independen dari negara, masih terikat dalam tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Dinamika dalam *civil society* dijelaskan Afan Gaffar dalam bukunya *Politik Indoensia: Tradisi*

Menuju Demokrasi, 1999 bahwa *civil society* adalah ruang (*space*), yang mana terdapat interaksi, toleransi dan partisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan secara publik dilakukan antara individu dan kelompok dalam suatu negara.

Menurut M. Parmudi (2017,299) *civil society* merupakan ruang yang didalamnya terdapat fungsi asosisasi secara sukarela oleh masyarakat dalam suatu negara dan saling berinteraksi dalam ruang tersebut. M Parmudi juga mengatakan bahwa *civil society* merupakan pola interaksi yang lahir dari masyarakat, adanya kelompok dan gerakan sosial yang terbangun dengan sifat independent terhadap suatu negara. Pengertian *civil society* dikembangkan pula oleh Azzuhri (2009,148) bahwa dengan adanya kondisi budaya yang melekat dalam diri masyarakat tidak terbelenggu oleh kuasa pemerintah namun terdapat kekuatan yang mewarnai masyarakat tersebut.

Karakteristik *civil society* dijelaskan oleh Bahmueller (1997) antara lain :

- a. Adanya integrasi individu maupun kelompok masyarakat
- b. Adanya kekuasaan yang tersebar dalam rangka mengurangi kepentingan yang terlalu mengontrol dan dapat diatasi oleh kekuatan masyarakat
- c. Adanya program pembangunan dari masyarakat yang serupa dengan program pembangunan pemerintah
- d. Adanya mediasi kepentingan antara individu dengan negara
- e. Adanya pemahaman terkait demokrasi agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh disetiap kebijakan pemerinntah
- f. Adanya kreativitas yang berkembang di tubuh masyarakat
- g. Adanya kebebasan dalam individu untuk memilih segala sesuatu

1.6.3. Manajemen Bencana

Manajemen ialah proses perancangan dan pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok secara efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. (Weilhrich & Cannice, 2010). Menurut Suprpto (2009) manajemen merupakan proses dari tindakan terhadap tahapan-tahapan kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun staf, mengarahkan, dan mengawasi. Begitu pula yang dijelaskan oleh Sahir dkk (2020) bahwa manajemen yakni metode yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agenda dari sumberdaya yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan dari suatu organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 bencana merupakan sebuah kejadian atau rangkaian kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam, non alam dan manusia yang mengancam keselamatan jiwa, menyebabkan kerusakan pada lingkungan, kerugian material serta berdampak bagi psikologis manusia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa bencana dibedakan menjadi tiga jenis; bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Coppola (2006) menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai bencana jika terdapat nyawa yang hilang, cedera yang diderita, harta benda yang rusak ataupun hilang serta adanya degradasi lingkungan.

Manajemen bencana yakni suatu perencanaan yang disusun secara strategis sesuai prosedur yang telah diatur dan ditetapkan, dijalankan dengan proses yang sistematis meliputi fase pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana sebagai proses penyelamatan dan perlindungan nyawa manusia atau infrastruktur saat

bencana alam dan non alam terjadi (UNISDR, 2009). Definisi manajemen bencana menurut Ramli (2010:31) merupakan proses dengan tahapan-tahapan yang terencana untuk mengelola suatu bencana secara tepat, aman, dan baik membutuhkan tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Coppola (2006) menjelaskan bahwa manajemen bencana merupakan proses dan praktik dengan empat fase manajemen yakni mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan non organisasi non-pemerintah yang terlibat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal 3 dijelaskan bahwa manajemen bencana atau penajaan penanggulangan bencana terdiri atas tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Menurut Ulum (2014) dalam bukunya berjudul “Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif”, manajemen bencana perlu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor seperti komitmen politik pemerintah, institusional, sistem Informasi manajemen, partisipasi komunitas atau masyarakat, mobilisasi, dan distribusi sumber daya.

The Disaster Management Cycle atau Siklus Penanggulangan Bencana menurut Carter (2008) meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dampak bencana, respon tindakan, pemulihan, dan pengembangan. Tiap-tiap negara memiliki kerawanan kebencanaan yang berbeda, oleh karena itu Carter menyarankan agar negara bisa memilih bentuk siklus penanggulangan bencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Beberapa program yang bisa diaplikasikan bagi negara untuk memberikan manajemen bencana secara praktis yakni seperti pengadaan program pelatihan, kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari,

pemberian pendidikan dan kesadaran publik, serta mengawal perkembangan pemerintah sebagai sarana evaluasi.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Collaborative governance

Collaborative governance merupakan komposisi kerjasama beberapa pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat untuk menentukan keputusan dan tujuan bersama.

1.7.2. Civil society

Civil society merupakan ruang yang dibuat oleh masyarakat agar saling terintegrasi dan berinteraksi dengan sukarela untuk merespon kehidupan sosial dan berfungsi sebagai *check and balance* kebijakan-kebijakan negara yang terbentuk secara mandiri, independen, dinamis serta memiliki kebebasan untuk memilih dan mengadakan kegiatan pengawalan kebijakan pemerintah.

1.7.3. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari pra, saat, dan pasca bencana dengan tindakan bertahap sesuai dengan instruksi dan prosedur yang dilakukan untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta kondisi infratraktur.

1.8. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu teori mengenai *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash yang akan digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah mengenai dinamika beserta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19.

Model tahapan *collaborative governance* dalam Ansell dan Gash (2007:8) yang akan digunakan untuk meneliti dan menjawab kedua rumusan masalah tersebut yakni :

Tabel 1.2
Definisi Operasional

No.	Teori	Variabel	Indikator
1.	<i>Collaborative governance</i>	Kondisi Awal <i>(Starting Condition)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - adanya permasalahan banjir rob - <i>stakeholder</i> yang menjadi relasi dan terlibat dalam penanganan banjir rob
		Kepemimpinan Fasilitatif <i>(Facilitative Leadership)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaaan forum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan <i>civil society</i> dalam menetapkan aturan dasar dan kesepakatan bersama

	<p>Desain Institusional <i>(Institutional Design)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - adanya aturan dasar dan kesepakatan kolaborasi dari pemangku kepentingan yang akan diterapkan dalam penanganan banjir rob
	<p>Proses Kolaborasi <i>(Collaborative Process)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya dialog antar stakeholders - terbentuknya komitmen - adanya pemahaman bersama - adanya hasil kolaborasi antar stakeholders

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan fokus pada fenomena dan realitas sosial yang terjadi dan mengembangkan teori sosial yang didapatkan melalui empiri sesuai dengan fenomena dan kasus yang sedang diteliti (Somantri, 2005). Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendalami dan menjelajahi suatu gejala sentral yang didapatkan berupa informasi yang dianalisis kemudian menjadi deskripsi tertulis (Creswell, 2007). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penyajian data dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar atau kalimat yang memunculkan pemahaman yang nyata dengan deskripsi kalimat yang mendalam, rinci dan lengkap menjelaskan situasi yang sebenarnya (Nugrahani, 2014).

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk melihat dinamika kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dan *civil society* sebagai upaya penanganan banjir rob khususnya pada masa pandemi COVID-19 sesuai data yang didapatkan peneliti melalui wawancara ataupun proses analisis sosial. Peneliti akan menyertakan deskripsi data sesuai lapangan yang berkaitan dengan bentuk kolaborasi dari pemangku kepentingan penanganan banjir rob di Kota Pekalongan serta menjelaskan hambatan apa yang terjadi dalam proses kolaborasi tersebut.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah yang terkena dampak banjir rob di Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat.

1.9.3. Unit Analisa

Tabel 1.3
Unit Analisa Data

No.	Lokasi	Jumlah	Narasumber
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan	1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBD Kota Pekalongan
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan	1	Perencana Muda BAPPEDA Kota Pekalongan
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan	1	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan
3.	Kecamatan Pekalongan Barat	1	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Tata Tertib Kecamatan Pekalongan Barat
4.	Kecamatan Pekalongan Utara	1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Pekalongan Utara
5.	LSM Bara Air	1	Wakil Ketua Komunitas Bara Air Kota Pekalongan
6.	LSM Kemitraan	1	<i>Team Leader</i> Kemitraan Kota Pekalongan

7.	LSM Sadar Peduli Lingkungan Dimanasaja (SAPULIDI)	1	Ketua SAPULIDI Kota Pekalongan
8.	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kota Pekalongan	1	Sekretaris MDMC Kota Pekalongan
9.	Kecamatan Pekalongan Utara	2	Masyarakat Umum Kecamatan Pekalongan Utara

1.9.4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data dengan didapatkan secara langsung (Sugiyono, 2013). Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan lain-lain oleh pihak pertama (Suharsimi, 2013).

Tabel 1.4
Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Manajemen bencana penanganan banjir rob di Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBD Kota Pekalongan	Wawancara

2.	Perencanaan kebijakan terhadap penanganan dan pembangunan di wilayah banjir rob pada masa pandemi COVID-19	Perencana Muda BAPPEDA Kota Pekalongan	Wawancara
3.	Pengadaan, pemeliharaan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah banjir rob Kota Pekalongan	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan	Wawancara
4.	Strategi dan peran kecamatan terhadap penanganan banjir rob pada masa pandemi COVID-19	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Tata Tertib Kecamatan Pekalongan Utara	Wawancara
5.	Strategi dan peran kecamatan terhadap penanganan banjir rob pada masa pandemi COVID-19	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Pekalongan Utara	Wawancara
6.	Peran kolaboratif pendukung penanganan banjir rob Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19	Wakil Ketua Komunitas Bara Air Kota Pekalongan	Wawancara

7.	Peran kolaboratif pendukung penanganan banjir rob Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19	<i>Team Leader</i> Kemitraan Kota Pekalongan	Wawancara
8.	Peran kolaboratif pendukung penanganan banjir rob Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19	Ketua SAPULIDI Kota Pekalongan	Wawancara
9.	Peran kolaboratif pendukung penanganan banjir rob Kota Pekalongan pada masa pandemi COVID-19	Sekretaris MDMC Kota Pekalongan	Wawancara
10.	Proses dan hasil kolaborasi yang dirasakan oleh masyarakat terkait penanganan banjir rob pada masa pandemi COVID-19	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara	Wawancara

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer yang sudah didapatkan tidak secara langsung melalui pihak pertama namun bisa bermanfaat sebagai penunjang data dalam sebuah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berbentuk buku, jurnal, artikel, kajian pustaka atau dokumen-dokumen lain yang didapatkan melalui buku secara

langsung, internet, ataupun arsip dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan *civil society* dalam penanganan banjir rob pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 1.5
Data Sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah masyarakat Kota Pekalongan	Badan Pusat Statistik	Dokumentasi
2.	Data dan kegiatan pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani banjir rob pada masa pandemi COVID-19	DPUPR Kota Pekalongan	Dokumentasi
3.	Data dan kegiatan LSM dalam menangani banjir rob pada masa pandemi COVID-19	LSM Kemitraan	Dokumentasi

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknis pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban permasalahan dari penelitian. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain :

- a) Wawancara

Salah satu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dalam hal ini yang dimaksud adalah pewawancara dan yang diwawancarai atau narasumber atau sumber informasi penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka, namun karena adanya pandemi COVID-19 peneliti menyesuaikan situasi dengan melakukan komunikasi langsung tidak melalui tatap muka namun secara daring (dalam jaringan) atau online (Yusuf, 2013). Menghindari kemungkinan terburuk seperti hilangnya informasi atau lupa dari memori peneliti, akan dilakukan perekaman suara ataupun video atas persetujuan dari narasumber.

Tabel 1.6
Data Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBD Kota Pekalongan	1
2.	Perencana Muda BAPPEDA Kota Pekalongan	1
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan	1
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Tata Tertib Kecamatan Pekalongan Barat	1
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Pekalongan Utara	1
6.	Wakil Ketua Komunitas Bara Air Kota Pekalongan	1
7.	<i>Team Leader</i> Kemitraan Kota Pekalongan	1
8.	Ketua SAPULIDI Kota Pekalongan	1

9.	Sekretaris MDMC Kota Pekalongan	1
10.	Masyarakat Umum Kecamatan Pekalongan Utara	2

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data merupakan suatu teknik dengan menggunakan arsip, gambar, foto, film, catatan, ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai arsip data dari masa lampau atau peristiwa yang telah terjadi serta memudahkan peneliti terhadap keabsahan dan kelengkapan data. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang akan digunakan perlu memperhatikan terkait validitas, kredibel, representatif, dan maknanya. Dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder atau pendukung data primer ini peneliti peroleh dari Kecamatan Pekalongan Utara dan Barat serta Badan KESBANGPOL dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekalongan.

c) Observasi

Observasi menjadi salah satu teknik penting dalam pengumpulan data. Observasi merupakan keseluruhan yang dilihat dan didengar pada sumber penelitian dengan analisis dan pencatatan secara sistematis tingkah laku individu dan atau kelompok yang diteliti. Dalam penelitian ini membutuhkan pengamatan yang tidak terbatas pada informan atau seseorang, namun pengamatan juga perlu dilakukan pada objek seperti peristiwa, benda, alam, dan lain-lain. Nugrahani (2014) juga menguraikan tahapan observasi antara lain pengamatan deksriptif, terfokus dan terseleksi. Ditinjau berdasarkan pelaksanaannya, observasi terbagi

menjadi dua yakni observasi berperan dan observasi tidak berperan atau tanpa partisipan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi serangkaian proses kolaborasi pemerintah Kota Pekalongan dan *civil society* dalam menangani bencana banjir rob pada masa pandemi COVID-19.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah sebuah usaha dari peneliti dalam menganalisis dan memaknai data baik berupa gambar atau teks yang digunakan secara menyeluruh. Analisis data dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan analitis peneliti yang memerlukan refleksi dan menjadi proses yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peneliti bisa menganalisis data saat pelaksanaan wawancara, penemuan dokumen-dokumen dan saat melakukan observasi. Menganalisa data dilakukan terus menerus dan berlangsung secara interaktif hingga bisa diambil kesimpulan dan analisis data merupakan bagian dari keseluruhan proses dari penelitian (Miles & Huberman, 2002). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data, pereduksian data, penyajian dan penyesuaian data serta pengambilan kesimpulan.